

Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Regional (UMR) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Sumatera Utara

¹Tarmiji Hamid Siregar, ²Fauzi Arif Lubis, ³Nurul Inayah

¹Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

²Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

³Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : tarmijiamid7@gmail.com, lubisfauziarif@gmail.com,
nurulinayah@uinsu.ac.id

Corresponding Mail Author: tarmijiamid7@gmail.com

Abstract : This study aims to determine the influence of PDRB, UMR and TPT on people's welfare (HDI) in North Sumatra Province for the 2017-2021 period. This research is a type of quantitative research that is associative in nature with a sample of 135 data from 27 districts/cities in North Sumatra Province which were collected through documentation from BPS. Data analysis technique using multiple linear regression analysis. The results of the study show: (1) PDRB partially has a positive and significant effect on people's welfare; (2) Partial UMR has no significant effect on the welfare of the community; (3) TPT partially has a positive and significant effect on people's welfare; and (4) PDRB, UMR and TPT jointly (simultaneously) have a significant effect on people's welfare in North Sumatra Province during the 2017-2021 period. The magnitude of the influence of the PDRB, UMR and TPT variables simultaneously on community welfare is 17.6% and the remaining 82.4% is explained by other variables besides the variables proposed in this study.

Keywords: PDRB, UMR, TPT, HDI.

I. Pendahuluan

Manusia dalam menghadapi berbagai persoalan masalah hidup yang di dalamnya mengandung berbagai kemungkinan resiko baik bersifat material maupun spritual (Angkat & Lubis, 2022). Segala bentuk aktivitas manusia yang bertujuan untuk memudahkan manusia lainnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah (Lubis, 2023). Ajaran Islam meletakkan dasar bahwa kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat berjalan bersama, seiring dan saling melengkapi, bukan saling bersaing dan bertentangan. Sistem ekonomi Islam berupaya meminimalisir kemungkinan timbulnya konflik dan mengatur agar terwujudnya saling memberi manfaat (Sudiarti, 2018). Ekonomi selalu menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak negara berkembang. Permasalahan ekonomi pun selalu mendapat pandangan yang negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, salah satu contohnya adalah kemiskinan.

Pandangan Islam terhadap perekonomian yang bersifat solutif ini perlu didukung penuh dari pemerintah (Sirergar & Lubis, 2022).

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju kearah yang lebih baik bagi masyarakat, adapun keberhasilan dalam pembangunan merupakan tujuan utama di setiap daerah, hal ini dikarenakan dengan adanya pembangunan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suharlina, 2020). Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita dalam jangka panjang dan diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Yasa & Arka, 2015).

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam, merupakan kesejahteraan secara menyeluruh baik kesejahteraan secara material, maupun spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi syariah juga tidak hanya diukur berdasar pada nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan nilai sosial (Diani & Lubis, 2022).

Kesejahteraan menurut ekonomi Islam sering kali diistilahkan dengan kata *fallah* kata *fallah* berasal dari bahasa Arab dari kata *aflaha-yuflihu* yang artinya kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. *Fallah* adalah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, kesejahteraan ini dapat terwujud apabila memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang (Nasution et al., 2022).

Kesejahteraan adalah kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup masyarakat (Jannah & Syahnur, 2016). Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif (Mulia & Saputra, 2020).

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP (*United Nations Development Programme*) telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan manusia di suatu negara (Dalimunthe & Imsar, 2023), yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup (Mulia & Saputra, 2020).

Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud jika pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah, sehingga

setiap negara memperhatikan laju pertumbuhan ekonominya. Masalah ekonomi sebenarnya muncul akibat adanya perbedaan antara kebutuhan manusia dan sumberdaya (alat pemenuh kebutuhan) yang ada, yang mana kebutuhan manusia mempunyai sifat tak terbatas (Inayah, 2020).

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dalam suatu periode. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah tertentu dan dapat juga dikatakan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Imsar et al., 2023).

Besaran pendapatan dalam indikator standar hidup layak tentu akan mempengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka akan semakin besar pula tingkat pengeluarannya sehingga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan hidup. Apabila tingkat kesejahteraan meningkat dikarenakan peningkatan pendapatan, maka capaian IPM juga akan meningkat. Besaran pendapatan suatu masyarakat dapat digambarkan melalui PDRB per kapita yang juga dipandang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu wilayah, maka akan mencerminkan adanya peningkatan perekonomian masyarakat (Hidayat & Woyanti, 2021). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah.

Tingkat pertumbuhan indeks pembangunan pada suatu daerah juga dapat diukur dengan perkembangan Upah Minimum Regional (UMR), bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan serta perubahan kesejahteraan manusia. Perkembangan UMR dari waktu ke waktu akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan. Dengan demikian, keadaan tersebut akan dapat berakibat pada kemampuan para pekerja untuk meningkatkan konsumsi pembelanjaan, dan pada akhirnya terjadi peningkatan ekonomi secara agregat, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan UMR akan dapat berefek pada IPM (Kiha et al., 2021).

Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak (Amrullah, 2022). Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Peningkatan upah minimum akan meningkatkan kebutuhan hidup yang layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan (Megantara & Budhi, 2020).

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pengangguran. Pengangguran termasuk salah satu indikator sosio ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah (Imsar, 2018). Menurut Arifin & Soesatyo (2020), menurunnya kesejahteraan juga dipengaruhi oleh pengangguran. Karena pengangguran merupakan salah satu sumber masalah ekonomi, ketidakseimbangan jumlah angkatan kerja dengan tersedianya lapangan kerja menjadi penyebab terjadinya pengangguran, Tingginya angka pengangguran di suatu Negara dan suatu daerah akan berdampak pada perekonomian Negara atau daerah tersebut.

Dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi penghasilan masyarakat yang akhirnya mengurangi tingkat kesejahteraan yang sudah dicapai seseorang. Semakin menurunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang masyarakat terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki penghasilan. Jika pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu terjadi dalam prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Rahmawati & Anwar, 2020).

Berdasarkan data tingkat kesejahteraan masyarakat (penduduk) yang diukur dari IPM Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017-2021 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun dan peningkatannya tersebut sejalan dengan peningkatan PDRB. Meskipun demikian peningkatan IPM tidak sejalan dengan UMP/UMK dan TPT Provinsi yang menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan yang fluktuatif selama periode 2017-2021.

Hasil penelitian Mulia & Saputra (2020), Devi (2019), menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Shavira et al (2021), menyimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara hasil penelitian Devi (2019), menyimpulkan bahwa UMR tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut hasil penelitian Shavira et al (2021), menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian Mulia & Saputra (2020), menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dan kesenjangan hasil penelitian terdahulu (*research gap*) maka peneliti penelitian ini dengan tujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB, UMR dan TPT baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017-2021.

II. Landasan Teori Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang mengandung pengertian dari bahasa sanskreta “*Cantera*” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “*Catera*” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin (Hasimi, 2020).

Kesejahteraan merupakan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air

minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tenang, baik lahir maupun batin (Saifudin, 2019).

Kesejahteraan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Makna Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep kesejahteraan ekonomi syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Konsep kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjalannya 5 prinsip dalam maqashid syariah, yakni terjalannya *agama (ad-din)*, terjalannya jiwa (*an-nafs*), terjalannya akal (*al-aql*), terjalannya keturunan (*an-nasl*) dan terjalannya harta (*al-mal*) (Suardi, 2021).

Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator. Menurut Badan Pusat Statistik indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anda ke jenjang pendidikan, kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi (Jannah & Syahnur, 2016).

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP (*United Nations Development Programme*) telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup (Mulia & Saputra, 2020).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian regional (daerah). Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah kenaikan *output agregat* (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu (BPS, 2022).

PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dalam suatu periode. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah tertentu dan dapat

juga dikatakan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Bintang & Woyanti, 2018).

Upah Minimum Regional (UMR)

Upah merupakan imbalan dari hasil kerja yang dilakukan seseorang kepada perusahaan (Iksan et al., 2020). Menurut teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu (Gunawan et al., 2022).

Upah minimum regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu. Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Peningkatan upah minimum akan meningkatkan kebutuhan hidup yang layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan (Megantara & Budhi, 2020).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terdapat dalam setiap negara, terutama pada pengangguran normal, yang diakibatkan adanya masa transisi dari seseorang ketika meninggalkan pekerjaan lama dan belum menemukan pekerjaan yang baru, atau ketika baru lulus dari pendidikan dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran sendiri merupakan suatu kondisi dari seseorang yang masuk dalam angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan (Soeharjoto & Oktavia, 2021).

Tingkat pengangguran merupakan presentase angkatan kerja yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan. Besar kecilnya angka pengangguran sangat tergantung dari definisi dan pengklasifikasian pengangguran. Dalam sudut pandang makro ekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan suatu masalah. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah terciptanya pengangguran akibat dari lebih rendahnya penambahan lapangan kerja dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja. Pengangguran yang tinggi dapat menurunkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat. Jika tingkat pengangguran rendah pertumbuhan ekonominya meningkat, begitu juga sebaliknya (Padang & Murtala, 2019).

Pengangguran terbuka adalah persentasi penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan, angkatan kerja sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari

pekerjaan serta orang tergelong angkatan kerja, ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan (Sukirno, 2018). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mempunyai arti yaitu pengangguran yang dialami tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini memang jenis pengangguran yang bisa dibilang cukup banyak, karena memang belum mendapatkan pekerjaan meskipun sudah berusaha dengan maksimal untuk mencari pekerjaan yang semua hal itu disebabkan karena pertumbuhan penambahan tenaga kerja lebih tinggi dari pada pertumbuhan lapangan pekerjaan, dampak dari situasi seperti ini mereka tidak melakukan suatu pekerjaan (Permadi & Chrystanto, 2021).

III. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif kausal. Penelitian dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan periode pengamatan selama 5 tahun (2017-2021) sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 135 data observasi ($5 \times 27 = 135$).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Data dalam penelitian ini berupa data IPM, PDRB, UMR dan TPT Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, dengan periode 2017-2021. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumentasi untuk mendapatkan data resmi yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sumatera Utara.

Data penelitian dianalisis menggunakan *software* statistik dengan bantuan program SPSS untuk menghasilkan statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas), dan pengujian hipotesis (uji-t, uji-F, dan uji koefisien determinasi).

IV. Hasil dan Pembahasan

Pengaruh PDRB terhadap Kesejahteraan (IPM) di Provinsi Sumatera Utara

Kesejahteraan masyarakat pada penelitian ini diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) sebagai salah satu indikator untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud jika pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dalam suatu periode. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah tertentu dan dapat juga dikatakan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel Ln PDRB merupakan variabel yang berpengaruh paling besar terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2017-2021 yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,778. Angka sebesar 0,778 mengindikasikan bahwa setiap

kenaikan nilai Ln PDRB sebesar 1 persen maka kesejahteraan masyarakat yang diwakili oleh IPM akan mengalami kenaikan sebesar 0,778 persen dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap nol atau konstan (tetap).

Lebih lanjut hasil analisis dan pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,356 > 1,645$ dan nilai probabilitas (sig) sebesar $0,020 < 0,05$ sehingga secara statistik hipotesis pertama (H_1) diterima dan disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017-2021.

Hasil penelitian yang telah dilakukan juga sejalan dan mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Devi (2019), menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan. Hasil penelitian Mulia & Saputra (2020), menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. Hasil penelitian Fatimah et al (2020), menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut hasil penelitian Amrullah (2022), menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Pulau Madura.

Pengaruh UMR terhadap Kesejahteraan (IPM) di Provinsi Sumatera Utara

Tingkat pertumbuhan indeks pembangunan pada suatu daerah juga dapat diukur dengan perkembangan Upah Minimum Regional (UMR). Perkembangan UMR dari waktu ke waktu akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan. Keadaan tersebut akan dapat berakibat pada kemampuan para pekerja untuk meningkatkan konsumsi pembelanjaan, dan pada akhirnya terjadi peningkatan ekonomi secara agregat, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan UMR akan dapat berefek pada IPM (Kiha et al., 2021). Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud jika pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, yang akan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak (Amrullah, 2022).

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel Ln UMR memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,441. Angka sebesar 0,441 mengindikasikan bahwa secara simultan setiap kenaikan nilai Ln UMR sebesar 1 persen maka kesejahteraan masyarakat yang diwakili oleh IPM akan mengalami kenaikan sebesar 0,441 persen dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap nol atau konstan (tetap).

Lebih lanjut berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,179 < 1,645$ dan nilai probabilitas (sig) sebesar $0,859 > 0,05$ sehingga secara statistik hipotesis kedua (H_2) ditolak dan disimpulkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017-2021.

Hasil penelitian yang telah dilakukan juga sejalan dan mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan Devi (2019), yang menyimpulkan bahwa UMR tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan.

Pengaruh TPT terhadap Kesejahteraan (IPM) di Provinsi Sumatera Utara

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran. Arifin & Soesatyo (2020), menjelaskan bahwa menurunnya kesejahteraan juga dipengaruhi oleh pengangguran. Hal ini dikarenakan pengangguran merupakan salah satu sumber masalah ekonomi, ketidakseimbangan jumlah angkatan kerja dengan tersedianya lapangan kerja menjadi penyebab terjadinya pengangguran, Tingginya angka pengangguran di suatu negara dan suatu daerah akan berdampak pada perekonomian negara atau daerah tersebut.

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel TPT memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,432. Angka sebesar 0,432 mengindikasikan bahwa secara simultan setiap kenaikan nilai TPT sebesar 1 persen maka kesejahteraan masyarakat yang diwakili oleh IPM akan mengalami kenaikan sebesar 0,432 persen dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap nol atau konstan (tetap).

Lebih lanjut berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,020 > 1,645$ dan nilai probabilitas (sig) sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga secara statistik hipotesis ketiga (H_3) diterima dan disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017-2021.

Periode pengamatan dalam penelitian ini dilakukan selama 5 tahun yaitu tahun 2017-2021. Hasil analisis menunjukkan bahwa TPT Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara selama 5 tahun (2017-2021) mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif yaitu TPT Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 mencapai 5,60% dan menurun menjadi 5,56% tahun 2018 dan sebesar 5,41% tahun 2019. Pada tahun 2020, TPT Provinsi Sumatera Utara kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,91% dan kembali menurun menjadi 6,33% pada tahun 2021.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat peningkatan TPT pada tahun 2020 yang mencapai 6,91% atau terjadi peningkatan sebesar 1,5% dibandingkan tahun 2019 (5,41%). Pada tahun 2021 TPT mencapai 6,33% atau terjadi peningkatan sebesar 0,92% dibandingkan tahun 2019 (5,41%). Peningkatan TPT tahun 2020 mungkin disebabkan karena adanya pemutusan hak kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Utara akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020.

Sejak pandemi Covid-19, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi penyumbang pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan akibat Covid-19. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mencatat ada 14.000 pekerja yang terkena PHK yang tersebar di 283 Perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang Pariwisata paling terkena dampak Covid-19 seperti perhotelan, biro-biro perjalanan dan usaha ritel seperti Plaza yang sesuai aturan Pemerintah bahwa Plaza-Plaza harus ditutup untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Hingga akhir November 2020, jumlah pengangguran karena dampak Covid-19 sebanyak 107.000 orang atau sekitar 21,60 persen terhadap total pengangguran (508 ribu orang) di Sumatera Utara. Jumlah ini menyebar hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara (Adha, 2021).

Hasil penelitian yang telah dilakukan juga sejalan dan mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan Susilo et al (2020), menyimpulkan bahwa jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan

manusia di Provinsi Papua tahun 2006-2015. Hasil penelitian Fammy (2021), menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2015-2020. Selanjutnya hasil penelitian Ainuri & Febrina (2022), menyimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua tahun 2020-2021.

Pengaruh PDRB, UMR dan TPT terhadap Kesejahteraan (IPM) di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data hasil penelitian dari 19 kabupaten dan 8 kota di Provinsi Sumatera Utara yang dijadikan sampel penelitian dengan periode pengamatan 5 tahun (2017-2021) dengan jumlah data sebanyak 135 data, diperoleh nilai rata-rata (*mean*) PDRB sebesar 9,3215 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,92298. Nilai Ln PDRB terendah sebesar 8,02 yaitu PDRB Kota Gunungsitoli pada tahun 2017 dan nilai Ln PDRB tertinggi sebesar 11,97 yaitu PDRB Kota Medan pada tahun 2021.

Untuk data Ln UMR selama periode pengamatan 2017-2021 (5 tahun) dengan jumlah data sebanyak 135 data, diperoleh nilai rata-rata Ln UMR sebesar 14,7420 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,12154. Hasil analisis menunjukkan nilai Ln UMR terendah sebesar 14,49 yaitu UMR Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Dairi pada tahun 2017 serta nilai Ln UMR tertinggi sebesar 15,02 yaitu UMR Kota Medan pada tahun 2021.

Untuk data TPT selama periode pengamatan 2017-2021 (5 tahun) dengan jumlah data sebanyak 135 data, diperoleh nilai rata-rata TPT sebesar 5,4470 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,61607. Hasil analisis data menunjukkan nilai TPT terendah sebesar 0,31 yaitu TPT Kabupaten Hasundutan pada tahun 2017 serta nilai TPT tertinggi sebesar 12,14 yaitu TPT Kota Pematangsiantar pada tahun 2018.

Untuk data kesejahteraan masyarakat yang diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) selama periode pengamatan 2017-2021 (5 tahun) dengan jumlah data sebanyak 135 data, diperoleh nilai rata-rata IPM atau HDI sebesar 71,8086 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,43098. Hasil analisis data menunjukkan nilai IPM atau HDI terendah sebesar 65,13 yaitu IPM atau HDI Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2017 serta nilai IPM atau HDI tertinggi sebesar 81,21 yaitu IPM Kota Medan pada tahun 2021.

Hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $10,516 > 2,68$ dengan nilai probabilitas (*sig*) $0,000 < 0,05$ sehingga secara statistik hipotesis keempat (H_4) diterima dan disimpulkan bahwa PDRB, UMR, dan TPT secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017-2021.

Lebih lanjut hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,176 atau sebesar 17,6% atau koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh mendekati angka 0 yang berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan kata lain besarnya pengaruh ketiga variabel bebas yaitu PDRB, UMR dan TPT secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (IPM) adalah sebesar 17,6% atau sisanya sebesar 82,4% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel yang diajukan dalam penelitian ini.

Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi linier yaitu: $IPM = 55,701 + 0,778 \text{ Ln PDRB} + 0,441 \text{ Ln UMR} + 0,432 \text{ TPT}$. Persamaan regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan), variabel yang berpengaruh paling besar terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2017-2021 adalah variabel Ln PDRB, diikuti variabel Ln UMR dan variabel TPT.

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2017-2021.
2. Upah Minimum Regional (UMR) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2017-2021.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2017-2021.
4. PDRB, UMR dan TPT secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2017-2021.

Saran

1. Kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat melakukan kebijakan mengenai PDRB dan TPT di tingkat Kabupaten/Kota. Pemerintah juga diharapkan lebih memperhatikan masalah pendistribusian hasil pendapatan regional agar tidak terjadi masalah ketimpangan pendapatan serta memperhatikan peran penting ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran terbuka untuk menjaga kestabilan pendapatan masyarakat sehingga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi akademisi atau peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan kajian empirik untuk dapat disempurnakan guna ditelaah lebih jauh melalui penelitian sejenis di masa mendatang, dan diharapkan dapat menambah periode pengamatan maupun menambahkan variabel independen (bebas) lainnya sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif (menyeluruh) dan dapat digeneralisasikan.

VI. Daftar Pustaka

- Adha, A. (2021). *Strategi Perempuan Pekerja Pabrik dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020*. Medan: FIS, UNIMED.
- Ainuri, N. U. P., & Febrina, H. (2022). Dampak COVID-19 Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(3), 384–395. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i3.21672>
- Amrullah, R. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Anggaran Sektor Kesehatan,

- Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se- Kabupaten di Pulau Madura. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(1), 90–98.
- Angkat, E. Y., & Lubis, F. A. (2022). Analysis of Fund Management on Prucinta Products at PT. Prudential Syariah Binjai. *Jurnal EMAK (Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan)*, 3(3), 833–838.
- Arifin, S., & Soesatyo, Y. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Konsumsi dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat*. Jawa Tengah: Pena Persada.
- Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah (2011-2015). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1), 20–28.
- BPS. (2022). *Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2022*. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Dalimunthe, A. H., & Imsar. (2023). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Islamic Human Development Index (I-HdI) di Indonesia. *Cakrawala - Repositori IMWI*, 6(1), 118–132.
- Devi, C. (2019). Pengaruh Upah Minimum, PDRB dan Tingkat Inflasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Nunukan. *Jurnal Ekonomika*, 12(01), 51–64.
- Diani, F., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Implementasi E-Katalog terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1970–1981.
- Fammy, M. R. (2021). *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Yogyakarta Tahun 2015-2020*. Surakarta: FIS, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fatimah, A. N., Prihastiyi, D. A., & Irawati, V. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PDRB terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Accounting Global Journal*, 4(2), 124–138.
- Gunawan, R., Yarsah, W. N., & Arsyah, T. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Upah Minimum Regional terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Pulau Sumatra. *Pareto: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 125–142.
- Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(1), 61–72.
- Hidayat, S., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan, Kemiskinan dan Teknologi terhadap IPM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 23(4), 122–137.
- Iksan, S. A. N., Arifin, Z., & Suliswanto, M. S. W. (2020). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 42–55.
- Imsar. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Periode 1989-2016. *Human Falah*, 5(1), 145–164.
- Imsar, Nurhayati, & Harahap, I. (2023). Analysis of Digital Education Interactions, Education Openness, Islamic Human Development Index (I-HDI) and

- Indonesia's GDE Growth. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 753–772.
<https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.4265>
- Inayah, N. (2020). Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Mencecil Emas (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pematangsiantar). *Laporan Penelitian, FEBI, UIN-SU*.
- Jannah, M., & Syahnur, S. (2016). Pengaruh Sektor Migas dan Nonmigas terhadap Kesejahteraan Masyarakat Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 1(2), 339–347.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Seuk, G. (2021). Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Regional terhadap Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Invest: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 41–56.
- Lubis, F. A. (2023). Analysis of User Reviews on the Use of Fintech Dana Syariah. *International Journal of Science and Society*, 5(2), 70–79.
- Megantara, D. E., & Budhi, M. K. S. (2020). Pengaruh Angka Melek Huruf dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 9(1), 91–119.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67–83.
- Nasution, W. R., Nawawi, Z. M., & Inayah, N. (2022). Analisis Pemanfaatan Lidi Kelapa Sawit dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2651–2658.
- Padang, L., & Murtala. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 8(02), 9–16.
- Permadi, E., & Chrystanto, E. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2018. *Oeconomics Journal of Economics*, 5(2), 86–95.
- Rahmawati, Y., & Anwar, K. (2020). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(2), 141–154.
- Saifudin, M. C. (2019). Analisis Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tujjar*, 07(02), 19–40.
- Shavira, S. O., Balafif, M., & Imamah, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Bharanomics*, 1(2), 93–103.
<https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.158>
- Sirergar, P. A., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal (Laz-Washal). *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(3), 30–34.

- Soeharjoto, & Oktavia, M. R. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 5(2), 94–102.
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Suharlina, H. (2020). Pengaruh Investasi, Pengangguran, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 56–72.
- Sukirno, S. (2018). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilo, J. H., Kholilurrohman, M., & Hasan, Z. (2020). Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 172–187. <https://www.journal.stienas-yph.ac.id/index.php/jdeb/article/view/238>
- Yasa, I. K. O. A., & Arka, S. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 63–71.